

Analysis of the Role of Reporting Systems, Internal Controls, and Transparency in Enhancing the Accountability of Village Fund Management

Tahmidatul Ummah¹, Barus Umarella^{2*}

¹Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

²Politenik Negeri Ambon, Ambon, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Village Governance, Fund Accountability, Reporting System, Internal Control, Financial Transparency.

ABSTRACT

Introduction/Main Objective: Accountability in village fund management is essential for transparent and responsible governance. This study analyzes the roles of reporting systems, internal control, and transparency in supporting accountability. Problem Background: Despite regulatory frameworks, village fund management still faces challenges related to reporting timeliness, internal control effectiveness, and public information disclosure. Novelty: This study integrates reporting systems, internal control, and transparency into a comprehensive framework for evaluating accountability. Research Methods: A descriptive qualitative approach was employed through interviews and document analysis involving six informants: the village head, two village officials, the Village Consultative Body (BPD) chairperson, and two community representatives. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing. Results/Findings: The findings show that reporting systems, internal control, and transparency generally comply with regulations, although reporting delays, limited human resource competencies, and low community literacy remain challenges. Conclusion: Strengthening reporting systems, internal control, and transparency, alongside capacity building and community participation, is essential for improving village fund accountability.

Pendahuluan/Tujuan Utama: Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini menganalisis peran sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi dalam mendukung akuntabilitas. Latar Belakang Masalah: Meskipun pengelolaan dana desa telah memiliki kerangka regulasi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait ketepatan waktu pelaporan, efektivitas pengendalian internal, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kebaruan: Penelitian ini mengintegrasikan sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi dalam satu kerangka komprehensif untuk mengevaluasi akuntabilitas. Metode Penelitian: Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara dan analisis dokumen terhadap enam informan, yaitu kepala desa, dua perangkat desa, ketua BPD, dan dua perwakilan masyarakat. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan/Hasil: Sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi secara umum telah sesuai dengan peraturan, meskipun masih terdapat keterlambatan pelaporan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan rendahnya literasi masyarakat. Kesimpulan: Penguatan sistem pelaporan, pengendalian internal, transparansi, peningkatan kapasitas, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*Jln. Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumahtiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon 97234, Maluku, Indonesia. Telepon (0911) 322714
E-mail address: barus.ahsan@gmail.com

INTRODUCTION

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dapat digunakan untuk membiayai setiap pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara normatif, pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa, dana bagi hasil pajak daerah, dana perimbangan pusat dan daerah, hingga hibah dan bantuan lain yang sah. Meskipun Dana Desa telah menjadi pilar penting dalam pembangunan wilayah pedesaan, efektivitas implementasinya masih menyisakan berbagai persoalan. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas (Joni & Hardianti, 2024). Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana penggunaan dana publik di tingkat desa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat.

Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dapat diidentifikasi melalui tingkat akuntabilitas yang terwujud dalam setiap tahapan pengelolaannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaporan keuangan yang akuntabel menjadi syarat utama, sehingga akuntabilitas berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian pengelolaan dana desa (Muksin et al., 2023). Akuntabilitas ini didasarkan pada tiga aspek utama yaitu pelaporan keuangan yang berkualitas, pengendalian internal yang efektif, dan transparansi informasi publik. Pelaporan keuangan memegang peran sentral sebagai alat monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana publik, yang mencakup penyusunan anggaran, buku kas, buku bank, buku pajak, serta Laporan Realisasi Anggaran (Sugiarti et al., 2023). Di sisi lain, pengendalian internal berfungsi untuk mencegah kecurangan dengan memastikan adanya pembagian wewenang, persetujuan transaksi dari pihak berwenang, serta kepatuhan terhadap prosedur. Adapun transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media seperti papan informasi, website, dan laporan tahunan agar publik dapat mengakses serta memahami perencanaan dan pelaksanaan dana desa secara menyeluruh. Aspek sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi harus berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Beberapa penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi telah dilakukan. Maghfirah et al. (2023) Yang memfokuskan penelitian pada pengelolaan keuangan desa di Desa Palangga berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah memenuhi indikator transparansi dan akuntabilitas. Dibuktikan dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, membuat laporan dan pertanggungjawaban secara rutin yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat dan masyarakat secara umum melalui musyawarah dan diumumkan di papan informasi desa. Sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk menelaah dan memahami alokasi penggunaan dana desa tersebut secara langsung. Sementara itu, penelitian oleh Da Ona et al. (2023) menekankan pada penerapan sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa di Desa Wolokoli berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Penelitiannya mengungkap bahwa meskipun Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pelaksanaannya masih terbatas, terutama dalam melibatkan masyarakat dan memastikan transparansi operasional. Keadaan tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan desa menjadi berkurang. Mengutip dari dua penelitian di atas menerangkan pentingnya sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan tiga aspek tersebut ke dalam satu penelitian utuh yang berkonsentrasi pada pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta, belum adanya penelitian terdahulu yang secara khusus menjadikan Desa Sumberarum sebagai objek penelitian.

Desa Sumberarum adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam mengupayakan kemajuan desa, Pemerintah Desa Sumberarum melakukan beberapa usaha dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sarana umum dan layanan dasar. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penggunaan dana desa secara fisik. Namun, secara nyata belum sepenuhnya menunjukan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Dalam wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan informan Kepala Urusan Keuangan Desa Sumberarum, menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan dana desa dibutuhkan kecermatan dalam pencatatan keuangan, pelaporan yang tepat waktu dan menaati regulasi yang ada. Problem utama yang dialami adalah terbatasnya pemahaman teknis perangkat desa, seperti dalam sistem pelaporan tersebut Pemerintah Desa Sumberarum telah melaksanakan laporan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku. Namun, kenyataannya masih terdapat beberapa problem, yaitu problem teknis dan administratif yang menyebabkan efektifitas ketepatan waktu pelaporan menjadi terlambat. Beliau juga menyatakan transparansi dana desa sudah dipublikasikan secara umum dan luas. Namun, keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap rincian laporan keuangan menjadi problem utama, sehingga

beberapa masyarakat jarang ada yang membaca laporan tersebut karena tidak memahami isinya. Pengendalian internal dilaksanakan dengan melakukan distribusi tugas antar perangkat desa dan konfirmasi internal pemerintah desa dalam melaksanakan setiap transaksi yang ada. Namun demikian, pengawasan internal belum dilaksanakan secara komprehensif dan terorganisir, sehingga masih rawan terjadi kesalahan dalam tahapan pengelolaan keuangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa problem utama pengelolaan dana desa di Desa Sumberarum berada pada belum adanya integrasi antara sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Kosentrasi utama dalam penelitian ini adalah menelaah fungsi ketiga aspek tersebut dalam mengupayakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan latar belakang diatas menghasilkan rumusan masalah bagaimana sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumberarum?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menelaah seberapa besar implementasi sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mengetahui problem yang muncul dalam pelaksanaannya, serta berguna untuk memberikan masukan dan saran dalam pengelolaan dana desa pada Desa Sumberarum agar berjalan dengan akuntabel. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa Sumberarum dalam melaksanakan tiga aspek tersebut dan juga menjadi landasan dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, mudah difahami dan terbuka.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk mendalami dan menelaah fenomena sosial terkait sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggali fakta-fakta pada objek penelitian yang terstruktur dan akurat dengan tujuan memperoleh data yang objektif. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 April sampai dengan 19 Mei 2025. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian fokus dalam penelitian ini, yang berlokasi di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Teknik utama yang digunakan untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini, berupa wawancara dan studi dokumen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dengan 6 informan kunci, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa Sumberarum yang mengelola dana desa secara langsung, serta Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 2 perwakilan masyarakat antara lain satu tokoh masyarakat yang kritis terhadap pengelolaan dana desa serta satu masyarakat yang bekerja sebagai petani. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah buku dan jurnal terbitan lima tahun terakhir yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik tersebut bertujuan untuk memperluas pemahaman teori ilmiah dan memperoleh data yang komprehensif sesuai dengan fakta yang ada.

Data yang dihasilkan dari penelitian ini dijabarkan menggunakan model teori interaktif melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu mengumpulkan inti informasi penting yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi dokumen yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi inti yang telah dikumpulkan dalam bentuk deskripsi singkat agar mudah diterangkan dan dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu membentuk sebuah gagasan akhir berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang diperoleh, untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

RESULTS

Tujuan utama pengelolaan dana desa dengan menggunakan sistem pelaporan, pengendalian internal dan transparansi adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Penelitian ini secara spesifik mengintegrasikan ketiga aspek tersebut terhadap realisasi penggunaan dana desa di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Adapun informan dalam wawancara ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan 2 unsur masyarakat. Hasil penelitian wawancara diperinci dalam tabel analisis sebagai berikut:

Analisis Sistem Pelaporan

Tabel 1. Analisis Hasil Wawancara Pelaksanaan Pelaporan Dana Desa dengan Informan Kaur Keuangan Desa Sumberarum

Indikator Pertanyaan	Hasil Wawancara	Inti Informasi (Reduksi Data)
Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama	“tahapan pelaporan semester pertama sudah dipenuhi, akan tetapi SDM kami terbatas, yang menyebabkan keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan dan kurang optimal dalam penyusunan detail laporan.”	Dalam sistem pelaporan keuangan dana desa, Desa Sumberarum telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang terkait. Namun masih terkendala teknis dan administratif.
Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes satu tahun berjalan	“Laporan realisasi anggaran APBDes telah kami buat lengkap setiap akhir tahun berjalan dan juga diinput dalam siskeudes. Kami juga telah mengumumkannya pada papan informasi. namun kendala teknis masih sering muncul, terutama dalam input data dan sinkronisasi sistem.”	Laporan realisasi APBDes telah disusun secara lengkap dan diinput ke dalam Siskeudes serta diumumkan kepada publik, namun masih menghadapi kendala teknis dalam proses input dan sinkronisasi sistem.

Dari hasil reduksi wawancara terhadap analisis Sistem pelaporan keuangan dana desa di Desa Sumberarum, telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup pelaporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan laporan realisasi APBDes tahunan. Kedua laporan telah disusun lengkap, diinput melalui aplikasi Siskeudes, dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Namun, pelaksanaan pelaporan masih menghadapi kendala teknis dan administratif, terutama dalam proses input dan sinkronisasi sistem, sehingga efektivitas dan keterbukaan pelaporan belum sepenuhnya optimal.

Analisis Pengendalian Internal.

Tabel 2. Analisis Hasil Wawancara Sistem Pengendalian Internal dengan Informan Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Indikator Pertanyaan	Hasil Wawancara	Inti Informasi (Reduksi Data)
1. Pemisahan tanggungjawab dan wewenang secara jelas	Kepala Desa: “dalam pelaksanaan tugas, kami telah melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan wewenang kita masing-masing. Namun, beberapa perangkat desa masih belum sepenuhnya memahami batasan tanggung jawab mereka, terkadang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.”	Pelaksanaan tugas di Desa Sumberarum telah mengikuti pembagian tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Namun, masih terdapat perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami batasan tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.
2. Transaksi dilakukan berdasarkan persetujuan resmi dari pihak berwenang	Kepala Desa: “Setiap transaksi harus mendapat persetujuan dari saya sebagai Kepala Desa dan juga dari Bendahara Desa terutama dalam penggunaan dana desa, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, proses persetujuan transaksi sering kali terlambat karena kekurangan waktu dari kami yang juga memiliki banyak tugas lain.”	Proses persetujuan transaksi di Desa Sumberarum dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara sesuai prosedur. Namun, sering terjadi keterlambatan dalam persetujuan karena keterbatasan waktu akibat padatnya tugas masing-masing pihak.
3. Praktik pelaporan yang sehat dan bebas dari kecurangan	Sekretaris Desa: “Kami selalu memastikan laporan keuangan desa disusun dengan menggunakan prosedur yang berlaku agar menghindari segala bentuk kecurangan, sebagai bentuk tanggungjawab kami. Namun, terkadang kesulitan dalam menyusun laporan yang lengkap karena dokumen pendukung dari	Penyusunan laporan keuangan desa dilakukan sesuai prosedur sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencegah kecurangan. Namun, proses pelaporan sering terkendala oleh keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen pendukung dari masing-masing kegiatan.

Indikator Pertanyaan	Hasil Wawancara	Inti Informasi (Reduksi Data)
	masing-masing kegiatan tidak selalu tersedia tepat waktu atau kurang lengkap.”	
4. Kompetensi sesuai dengan jabatan	Sekretaris Desa: "Kami selalu memastikan perangkat desa yang menangani keuangan memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kebingungan dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga butuh pendampingan dari pihak eksternal."	Dalam melaksanakan pelaporan perangkat desa sudah dipastikan berkompeten di bidangnya dengan dibekali pelatihan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, sehingga membutuhkan pendampingan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal di Desa Sumberarum telah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari pembagian wewenang dan tanggung jawab, persetujuan transaksi dan mewujudkan pelaporan keuangan yang bersih dan bebas dari kecurangan, dengan memastikan kompetensi dari perangkat desa. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan proses persetujuan akibat padatnya tugas, ketidak lengkapan dokumen pendukung kegiatan, serta kebutuhan akan pendampingan eksternal akibat masih adanya kebingungan dalam penyusunan laporan, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal belum sepenuhnya optimal.

Analisis Transparansi

Tabel 3. Analisis Hasil Wawancara Sistem Transparansi dengan Informan Ketua BPD dan Perwakilan 2 Elemen Masyarakat

Indikator Pertanyaan	Hasil Wawancara	Inti Informasi (Reduksi Data)
1. Adanya sistem keterbukaan, pedoman yang terstruktur dan mudah dipahami dalam laporan keuangan yang memuat pendapatan, alokasi penggunaan atau pengeluaran dan sisa saldo.	Ketua BPD: "Secara umum laporan keuangan desa sudah diumumkan ke publik di papan informasi, dan sudah memuat pendapatan, pengeluaran dan sisa saldo Tapi, struktur isi dari laporan itu terlalu teknis dan tidak dijelaskan secara rinci ke masyarakat." Masyarakat Kritikus : "kami meminta kepada Pemerintah Desa selain mengumumkan laporan keuangan di papan pengumuman. Juga kami sarankan untuk melakukan sosialisasi alokasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, namun belum dilaksanakan." Warga Umum : "saya lihat laporannya sudah di tempel di depan Balai Desa. Namun, saya jarang melihat. Karena kurang begitu memahami isinya. Hanya memahami jumlah pemasukan dan pengeluarannya saja."	Laporan keuangan desa telah diumumkan secara terbuka melalui papan informasi di Balai Desa, namun penyusunannya masih terlalu teknis dan belum disertai dengan penjelasan rinci. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan memahami isi laporan, bahkan cenderung kurang tertarik untuk membacanya. Selain itu, belum adanya sosialisasi langsung terkait alokasi penggunaan dana desa menambah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang disampaikan.

Kesimpulan reduksi data dari wawancara diatas menunjukan bahwa laporan keuangan desa telah disusun secara lengkap dan diumumkan secara terbuka melalui papan informasi, pemahaman masyarakat terhadap isi laporan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh penyajian laporan yang terlalu teknis serta minimnya sosialisasi langsung mengenai realisasi dan penggunaan dana desa, sehingga sebagian besar masyarakat hanya mengetahui gambaran umum tanpa memahami rincian pengelolaannya.

DISCUSSION

Analisis Sistem Pelaporan Keuangan pada Desa Sumberarum

Tahapan pelaporan dana desa berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam penerapan dan penjaminan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. selaras dengan prinsip dasar akuntabilitas yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam Permendagri tersebut diatur tahapan pelaporan alokasi dana desa terdiri dari Tahap pelaporan semester pertama dan Pelaporan tahunan.

Tahapan laporan semester pertama meliputi realisasi penggunaan APBDes dan kegiatannya yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota selambat-lambatnya pada bulan Juli periode saat itu. Kemudian hasil laporan tersebut oleh Bupati/Wali Kota dikumpulkan menjadi satu rekapan laporan lengkap yang kemudian disampaikan kepada Kepala KPPN dan juga tembusan disampaikan kepada Gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di dalamnya memuat laporan realisasi penyaluran dan laporan gabungan realisasi penyerapan dan output kegiatan penggunaan anggaran dana desa yang terealisasi. Waktu penyerahan laporan tersebut paling lambat minggu kedua bulan Agustus periode berjalan.

Kedua, tahap pelaporan tahunan, yang berisi realisasi APBDes secara lengkap selama satu tahun periode anggaran. Disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, BPD dan masyarakat secara luas. Batas waktu paling lambat penyampaian laporan ini tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Dalam laporan semester pertama dan laporan tahunan kepala desa dapat menyampaikannya kepada Bupati/walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software. Yakni pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Dalam melaksanakan kedua laporan tersebut Pemerintah Desa Sumberarum telah melaksanakan tahapan pelaporan dana desa sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Pelaporan juga sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi software Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Namun, sistem ini masih belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan tersebut dan ketergantungan yang tinggi terhadap pendamping eksternal. Pelaporan cenderung menjadi kurang memiliki nilai evaluatif yang kuat. Berbeda dengan Desa Sumbersekar, dalam penelitian Yuliani et al. (2022) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan telah efektif dan tepat waktu, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Analisis kritis sistem pelaporan keuangan dana desa
Perbandingan dengan penelitian Yuliani et al. (2022) di Desa Sumbersekar

Desa Sumberarum	Desa Sumbersekar	Hasil Analisis Kritis Perbandingan
Tahapan-tahapan pelaporan keuangan telah mengikuti regulasi yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan teknis dan terbatasnya kapasitas SDM. Terutama pada saat input dan sinkronisasi data, serta pelaporan yang tidak tepat waktu.	Tahapan pelaporan pada Desa Sumbersekar telah optimal dan efisien. Hal ini didukung oleh perangkat desa yang memiliki kompetensi tinggi. Sehingga pelaporan telah disusun secara akuntabel.	Pada Desa Sumberarum proses pelaporan keuangan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kesulitan teknis dan administratif, menjadi problem utama. sedangkan di Desa Sumbersekar pelaporan keuangan telah dilaksanakan dengan optimal dan efisien. Dikarenakan kualitas SDM perangkat desa yang baik dalam menyusun laporan tersebut.
Pada Desa Sumberarum, terdapat ketidakmandirian dalam menyusun laporan keuangan, karena masih adanya ketergantungan pada pendamping desa.	Pada Desa Sumbersekar laporan keuangan telah disusun secara mandiri oleh perangkat desanya. Karena, perangkat desa memiliki kapabilitas yang tinggi pada bidangnya.	Ketidakmandirian perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan karena masih adanya ketergantungan pada pihak eksternal menjadi salah satu problem dalam sistem pelaporan pada Desa Sumberarum.

Kesimpulan tabel analisis kritis di atas menyatakan bahwa kompetensi SDM perangkat desa dalam kemandirian administratif penyusunan laporan keuangan menjadi indikator utama dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan. Untuk mencapai kemandirian pelaporan keuangan tersebut, penyelenggaraan pelatihan secara mandiri menjadi kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan kompetensi SDM.

Analisis Sistem Pengendalian Internal di Desa Sumberarum

Pengendalian internal merupakan unsur penting dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan berintegritas. Menurut Yuesti (2023) dalam mengimplementasikan pengendalian internal memerlukan beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya pembagian tanggungjawab dan wewenang secara terperinci.
2. Adanya persetujuan resmi dari pihak berwenang untuk menyetujui setiap transaksi yang dilakukan.
3. Tata kelola yang baik dan berintegritas dalam menyusun pelaporan keuangan dan mengantisipasi segala perbuatan yang dapat menimbulkan kecurangan.
4. Memiliki keahlian sesuai dengan tugas dan fungsi pada jabatan yang sedang diemban.

Hasil wawancara dengan informan Kepala Desa dan Sekretaris Desa di atas, dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dapat disimpulkan bahwa di Desa Sumberarum telah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari pembagian wewenang dan tanggung jawab, persetujuan transaksi dan mewujudkan pelaporan keuangan yang bersih dan bebas dari kecurangan, dengan memastikan kompetensi dari perangkat desa. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan proses persetujuan akibat padatnya tugas, ketidaklengkapan dokumen pendukung kegiatan, serta kebutuhan akan pendampingan eksternal akibat masih adanya kebingungan dalam penyusunan laporan, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal belum sepenuhnya optimal. Jika dibandingkan dengan penelitian Anryck Da Ona et al. (2023). Yang menganalisis indikator sistem pengendalian internal (SPI) berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 di Desa Wolokoli, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Analisis kritis sistem pengendalian internal
Perbandingan dengan penelitian Anryck Da Ona et al. (2023) di Desa Wolokoli

Desa Sumberarum	Desa Wolokoli	Hasil Analisis Kritis Perbandingan
Indikator Sistem pengendalian internal pada desa sumberarum mulai dari pembagian wewenang, tanggung jawab, persetujuan transaksi, serta mewujudkan pelaporan keuangan yang bersih dan bebas dari kecurangan, telah terpenuhi.	Sistem pengendalian internal di Desa Wolokoli sudah mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008, namun implementasinya belum maksimal karena masih ada indikator yang belum terpenuhi yaitu pada aspek kegiatan pengendalian dan lingkungan pengendalian.	Desa Sumberarum dalam menerapkan sistem pengendalian internal mempunyai problem yang lebih mendasar dari segi pelaksanaan dan pengawasan berkala. Semua indikator-indikator SPI telah terimplementasikan. Namun, memiliki perbedaan signifikan dengan Desa Wolokoli masih ditemukan dua indikator SPI yang belum tercapai.
Sistem pengawasan dari dalam antar perangkat desa telah dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas korupsi dalam realisasi penggunaan anggaran. Namun, tidak terjadwal secara tetap dan belum ada prosedur pengawasan berkelanjutan.	Sistem pengawasan internal pemerintah desa sudah diterapkan secara efisien dan konsisten. Dikarenakan adanya upaya lanjutan dari pengawasan internal dan laporan keuangan. Untuk menerapkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan penggunaan dana desa.	Jika dibandingkan antara Desa Sumberarum dan Wolokoli. Desa Wolokoli lebih unggul dalam hal pengambilan upaya lanjutan pengawasan internal antar perangkat desa. Namun, keduanya belum mengimplementasikan pengawasan secara terstruktur dan komprehensif.

Dari hasil tabel analisis kritis di atas dapat diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal masih terdapat beberapa desa yang belum maksimal dalam menerapkan pengendalian internal secara komprehensif dan berkelanjutan. Dikarenakan kurangnya kompetensi SDM dan kurang efektifnya pengawasan. Sehingga pengimplementasian untuk mencapai akuntabilitas belum optimal secara keseluruhan.

Analisis Transparansi pada Desa Sumberarum

Transparansi menjadi salah satu komponen penting dalam mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi tidak hanya Sebatas laporan keuangan yang dipublikasikan saja. Namun, juga memberikan peran kepada

masyarakat untuk ikut andil dalam memahami dan menelaah alokasi penggunaan dana desa secara keseluruhan. Yusri dan Khairina (2003) menyatakan dalam penerapan transparansi terdapat enam aspek penting. Yaitu, keterjangkauan informasi kepada publik, adanya aturan dasar pelaporan keuangan yang sistematis, ketersediaan data secara menyeluruh, akurasi dan efisiensi waktu pelaporan, memuat penyampaian laporan pendapatan dan pengeluaran belanja desa dan kesesuaian mekanisme pelaporan dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian di Desa Sumberarum menunjukkan, bahwa pihak desa telah mengumumkan realisasi penggunaan APBDes di Balai Desa, yang di dalamnya memuat dana desa juga. Laporan realisasi tersebut secara umum telah memenuhi unsur penting realisasi APBDes. Kendati demikian, penyampaian realisasi keuangan tersebut berbasis pada format teknis, sehingga masyarakat kurang bisa memahami isi dari laporan tersebut, terutama yang tidak memiliki latar belakang administrasi keuangan, mengalami kesulitan dalam memahami rincian laporan yang disajikan. Akibatnya, keterbukaan informasi tidak sepenuhnya bermakna, karena hanya segelintir masyarakat yang mampu memahami informasi tersebut secara efektif.

Hasil wawancara dengan BPD dan Perwakilan beberapa elemen masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya keterangan langsung dari pemerintah desa terkait rincian alokasi penggunaan dana desa, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan tersebut, melalui forum musyawarah ataupun sosialisasi dan melalui media komunikasi lainnya.

Untuk memperoleh pemahaman secara keseluruhan. Maka, dilakukan analisis kritis dengan membandingkan penelitian yang saya lakukan di Desa Sumberarum dengan penelitian Muksin, dkk. (2023). Fokus perbandingan dengan menitik beratkan pada penyampaian informasi dan keterbukaan anggaran kepada masyarakat. Adapun uraian perbandingan akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Analisis kritis Transparansi
Perbandingan dengan penelitian Arifin Muksin di Desa Arumamang

Desa Sumberarum	Desa Arumamang	Hasil Analisis Kritis Perbandingan
Laporan realisasi APBDes telah disampaikan ke publik, melalui papan informasi di Balai Desa. Tetapi, masyarakat minim pemahaman terhadap substansi isi dari laporan tersebut. Sebab kurangnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa terhadap realisasi APBDes.	Transparansi laporan keuangan terhadap publik belum dilaksanakan. Terlihat dari tidak adanya informasi realisasi dana desa kepada masyarakat. Baik dijelaskan secara langsung melalui sosialisasi maupun diumumkan secara langsung melalui papan informasi.	Pada Desa Sumberarum meskipun transparansi telah disampaikan secara umum. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam keterlibatan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terhadap penjelasan substansi isi laporan keuangan yang telah diumumkan. Sedangkan, pada Desa Arumamang belum mengimplementasikan indikator transparansi. Dikarenakan tidak adanya penyampaian laporan keuangan dana desa kepada publik.

Kondisi ini menunjukkan secara jelas bahwa untuk mencapai akuntabilitas dari sistem transparansi bukan hanya diukur melalui laporan keuangan yang diumumkan di papan informasi saja, sehingga sebatas hanya mencerminkan administratif belaka. Namun, penting juga untuk memuat keterbukaan akses, penjelasan realisasi penggunaan dana serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atas laporan keuangan yang disampaikan.

CONCLUSION

Dalam merealisasikan pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu dianalisis menggunakan 3 aspek utama yaitu sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi. Untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut Desa Sumberarum telah mendekati optimal, beberapa indikator telah diimplementasikan dengan baik. Namun, terdapat beberapa problem yang dialami. Problem yang dihadapi dalam sistem pelaporan adalah kurangnya kompetensi SDM dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal pengendalian internal masih ditemukan sejumlah kendala, seperti ketidakjelasan pemahaman perangkat desa terhadap batas tanggung jawab, keterlambatan persetujuan transaksi akibat beban kerja, serta pelaporan yang terhambat oleh ketidaklengkapan dokumen pendukung. Dalam transparansi masih menghadapi tantangan dalam aspek substansi isi pelaporan dan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa keakuntabilisan pengelolaan dana desa pada Desa Sumberarum belum sepenuhnya terwujud dan masih banyak kendala-kendala yang harus diperbaiki agar benar-benar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kualitas sistem pelaporan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi perangkat desa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan aparatur desa yang lebih mandiri dalam menyusun laporan keuangan serta mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal. Dalam aspek pengendalian internal, pemerintah desa perlu mengoptimalkan mekanisme pengawasan melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Evaluasi tersebut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat desa agar tercipta koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta budaya kerja yang mendorong pengawasan dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dana desa.

Pada aspek transparansi, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat melalui penyusunan laporan yang lebih sederhana, informatif, dan mudah dipahami. Selain itu, sosialisasi mengenai alokasi dan realisasi penggunaan APBDes perlu dilakukan secara berkala sebagai sarana edukasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, pemerintah desa perlu mengintegrasikan sistem pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi ke dalam suatu mekanisme tata kelola yang saling mendukung. Integrasi ketiga aspek tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Anryck Da Ona, M. L. Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 256-269. <https://doi.org/10.55606/jumia.vii4.2044>
- Maghfirah, N., Marlinah, A., & Rahman, K. G. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Manuver*, 1(1), 52-64. <https://e-jurnal.nobel.ac.id>
- Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*. 6 (2), 1281-1296. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 9(3), 641-656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Raharjo, Muhammad M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara.
- Rifandi, Nofrizal. Dkk (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*. Widina Media Utama.
- Sari, Maya dan Hanum, Seprida (2022). *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. UMSU Press.
- Sugiharti, Dewi K. (2023). *Sistem Pengelolaan Dana Desa (Teori dan Kasus)*. CV. Dina Pustaka.
- Yuliana, A. S., Mukoffi, A., Wikardjo, S., & Himawan, S. (2022). Efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dari kualitas pelaporan keuangan desa di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 73-88. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php>
- Yusri & Khairina (2023). *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. PT Inovasi Pratama Internasional.